

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dimasa pergantian era reformasi pembangunan manusia merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia di negara-negara lainpun mempunyai kebijakan tersendiri dalam pembangunan manusia, hal ini karena pembangunan manusia menjadi prioritas peran pemerintah untuk menuju negara yang maju dalam segala aspek terutama pada sumber daya manusia. Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 diseluruh Dati II (Kota dan Kabupaten) membuat pemerintah mengubah sistem pemerintahan menjadi desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi telah diterapkan dalam manajemen pemerintahan Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir setelah sebelumnya kebijakan sentralisasi mendominasi manajemen pemerintahan. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam pembangunan karena mereka kini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Karena pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi

lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Di Indonesia kebijakan desentralisasi sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun kebijakan desentralisasi di Indonesia memang baru dimulai sejak 1 Januari 2001, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004.

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah menjadi pemain utama dalam pembangunan di daerah, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pada pasal ke 14 bahwa salah satu urusan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ialah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya UU No. 32 tahun 2004 dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah karena tiap daerah memiliki potensi berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang beraneka ragam. Lalu muncul permasalahan yang kompleks antar pemerintah daerah dalam

hal pendanaan biaya pembangunan, karena tiap daerah tidak cukup untuk memenuhi biaya pembangunan jika hanya mengandalkan sumber keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Dana perimbangan bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). UU No. 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” menyebutkan bahwa ketiga komponen dalam Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan utuh. Berikut adalah data dari Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi DIY dari tahun 2008-2013.

Table 1.1

**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi
DIY Tahun 2008-2013**

Kab/Kota	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Yogyakarta	78,95	79,28	79,52	79,89	80,24	80,51
Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33	75,95
Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05	75,51	76,01
Gunung Kidul	70,00	70,17	70,45	70,84	71,11	71,64
Sleman	77,24	77,07	78,02	78,79	79,39	79,97

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka

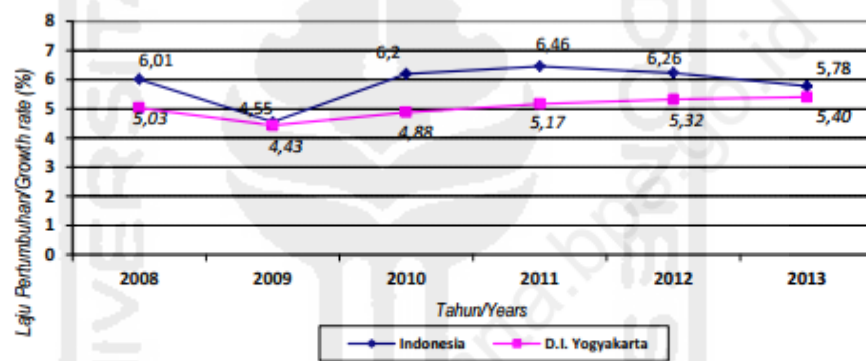
Dalam Tabel 1.1, dari data IPM tahun 2008 – 2013 pada kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa semuanya berada pada nilai antara 70,00 hingga 80,51. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada 5 kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa kabupaten dengan nilai IPM terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai 70,00 pada tahun 2008, meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya akan tetapi belum mampu untuk menyusul nilai IPM 4 kabupaten/kota lainnya yang juga mengalami kenaikan. IPM tertinggi selalu dimiliki oleh kota Yogyakarta dengan nilai 80,51 pada tahun 2013. Pada table 1.1 diatas menjelaskan adanya kenaikan IPM untuk semua kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan kegiatan atau kinerja ekonomi daerah yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro, 2006). Sedangkan menurut Arsyad (2004), pembangunan ekonomi

merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional riil per kapita meningkat dalam waktu lama. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia 2008-2013



Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY & Indonesia, 2008 – 2013 (persen)
Figure 3.1. Economic Growth Rate of DIY & Indonesia, 2008 – 2013 (percent)

Sumber : DIY Dalam Angka

Dalam gambar 1.1 secara umum, kinerja perekonomian provinsi DIY meningkat selama periode 2008-2013. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 persen per tahun, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi DIY sempat melambat menjadi 5,03 persen di tahun 2008, akibat pengaruh krisis global. Kondisi ini mulai membaik seiring dengan pasca erupsi merapi ditahun 2010.

Hingga tahun 2013 pertumbuhan ekonomi DIY berangsur-angsur naik hingga mencapai 5,40 persen (Gambar 1.1)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator dalam pembangunan ekonomi, hal ini karena di dalam IPM terdapat beberapa komponen dasar yang antara lain; angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan yang layak sehingga dapat menunjukkan seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di provinsi DIY pada khususnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008-2013” dapat memberikan gambaran analisis tentang sejauh mana peran beberapa variabel tersebut dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia hasil kinerja pemerintah pusat melalui transfer dana perimbangan ke daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk untuk dilakukang penelitian. Yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008 - 2013 ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008 - 2013?
3. Bagaimana pengaruh PRDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008 - 2013 ?

4. Bagaimana pengaruh PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008 - 2013?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
2. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
4. Menganalisis pengaruh PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara umum dalam penelitian ini menggunakan analisis kebijakan fiskal melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sehingga akan lebih untuk memahami strategi yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengintegrasikan penelitiannya, sehingga bermanfaat bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan keilmuannya dan akan bermanfaat untuk penelitian yang akan datang.

b. Bagi Pemerinta daerah

Penulis berharap dari adanya penelitian ini pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan, pengeluarannya serta pengelolaanya secara efektif dan efesien, sehingga dalam pengalokasiaanya lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini bertisi tiga bagian: *pertama*, berisi pendokumentasian dan pengakjian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. *Kedua*, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. *Ketiga*, merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah,

sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.

BAB II

Kajian Pustaka dan Landasan Teori

2.1. Kajian Pustaka

Demi memperkuat dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan peneliti terdahulu sebagai acuan dan referensi untuk mendukung dan mempermudah dalam menentukan variabel-variabel.

Berikut merupakan penelitian terdahulu dalam penelitiannya :

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian serta Hasil dan Analisis
1	Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusiadengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2009	Variabel depnden: Indeks Pembangunan Manusia Variabel independen: 1-Pertumbuhan Ekonomi 2-Dana Alokasi Umum 3-Dana Alokasi Khusus 4-Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : -Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal -Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

			<p>-Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p> <p>-Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p>
2	<p>Nizar Firmansah</p> <p>Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009-2013</p>	<p>Variabel dependen:</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel independen :</p> <p>1-Dana Perimbangan</p> <p>2- Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>3-Kemiskinan</p> <p>4-Belanja Modal</p>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <p>-Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>-Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>-Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>-Kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM</p>

3	<p>Decta Pitron Lugastoro</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2006-2011</p>	<p>Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel independen : 1-Pendapatan Asli Daerah 2-Dana Perimbangan</p>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
4	<p>Denni Sulistio mirza</p> <p>Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009</p>	<p>Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel independen : 1-Pertumbuhan Ekonomi 2-Kemiskinan 3-Belanja Modal</p>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM - Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM - Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
5	<p>Ginjar Budhi Utomo</p> <p>Faktor- faktor penentu indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta tahun 2004-2013</p>	<p>Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel independen : 1-Dana Perimbangan 2- Pendapatan perkapita 3-Belanja Modal</p>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM

6	<p>Putu Ayu Krisna Dewi I Ketut Sutrisna</p> <p>Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali tahun 2008- 2012</p>	<p>Variabel dependen : Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel independen : 1-Keuangan Daerah 2-Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Analisis regresi data linier berganda dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM -Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM
7	<p>Nur Baeti</p> <p>Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011</p>	<p>Variabel dependen : Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel independen : 1-Pengangguran 2-Pertumbuhan ekonomi 3-Pengeluaran Pemerintah</p>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM -Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Lilis Setyowati Yohana Kus
Suparwati (2012) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK,
DAU, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di kabupaten/kota
Jawa Tengah Tahun 2005-2009”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat

pengaruh masing-masing variable terhadap indeks pembangunan manusia. Estimasi model menggunakan metode data panel. Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, serta Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Nizar Firmansah (2015) melakukan penelitian menggunakan data panel di Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/kota dan dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013), dengan variabel dependen ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan variabel independen antara lain: Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa variabel Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Decta Pitron Lugastoro (2013) melakukan penelitian menggunakan data panel dengan *cross section* berjumlah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan *time series* tahun 2006-

2011 dengan menggunakan metode analisis *random effect model*. Variabel dependen yang digunakan adalah IPM, dan variabel independennya ialah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Hasil estimasi yang diperoleh penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Denni Sulistio Mirza (2012) yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Estimasi model menggunakan metode data panel. Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabel Kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, serta belanja modal juga berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,274209 terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.

Ginanjar Budhi Utomo (2015), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penentu indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta tahun 2004-2013. Dengan menggunakan regresi data panel hasilnya menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Putu Ayu Krisna Dewi I Ketut Sutrisna (2014) yang berjudul “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali tahun 2008-2012”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Estimasi model menggunakan metode data linier berganda. Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabel Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Nur Baeti (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Estimasi model menggunakan metode data panel. Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabel Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Sunarno dan Eka R (2006) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, komponen yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Menurut Mooris, keterkaitan pembangunan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) mampu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator : tingkat harapan hidup, angka kematian, tingkat melek huruf, dan tingkat pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli masing – masing negara (Lincoln, 2004,37). Pada tahun 1992 Badan Pusat Statistik mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut indikator susenas inti (*core Susenas*), indikator tersebut adalah : Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertisasi , ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit, hanya mengukur sebagian dari keadaan pembangunan manusia yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Indikator tersebut dijadikan sebagai indikator indikator yang paling layak untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan jangka panjang (BPS-Bappenas-UNDP, 2001).

2.2.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2004). Menurut UU no.25 / 1999 pasal 6, dana perimbangan terdiri dari :

- a) Bagian daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh, orang pribadi dan SDA
- b) Dana Alokasi Umum (DAU)
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibedakan menjadi :

- a) Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana bagi hasil dari perpajakan, yang terdiri dari PBB, BPHTB dan PPh
- b) Dana Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam yaitu bagi hasil yang bersumber dari SDA (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi) yang terdiri dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent dan penerimaan dari uang eksplorasi

2) Dana Alokasi Umum (Block Grants)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Abdul Halim dan Ibnu Mujib (2009), menerangkan bahwa Dana alokasi umum ini dialokasikan berdasarkan suatu rumus yang memasukkan unsur potensi penerimaan daerah dan kebutuhan objektif pengeluaran daerah dan dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN

3) Dana Alokasi Khusus (*Special Grants*)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Alokasi Khusus dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Menurut Adisasmita (2014), yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:

- a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, misalnya :
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah pesisir/kepulauan.
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
- b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional yang meliputi:
- Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah dengan lembaga donor.
 - Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Tahunan.

2.2.3. Belanja modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Alokasi dana oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal dalam APBD bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap yaitu

peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaantugas pemerintah maupun fasilitas publik. Peningkatan fasilitas layanan publik secara simultan akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat karena alokasi belanja untuk sarana pendidikan dan kesejahteraan juga akan bertambah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Asset tetap tersebut dipergunakan untuk oprasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Indikator belanja modal dapat dilihat dalam ringkaan dibawah ini :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Asset Tetap Lainnya.

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Tavip A. Rayanto (2002) jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit aa jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah pada

saaat periode tertentu. Secara kuantitatif merupakan nilai barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan atas dasar harga konstan (*at constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengukur besarn pembangunan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi , sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi riil atau perubahan volume produksi.

PDRB sebagai neraca regional dimana ukurannya dapat dipisahkan sebagai PDRB sektoral pada sisi kiri dan PDRB menurut penggunaan pada sisi kanan. Manfaat PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai ukuran pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas regional. Kemampuan pengelolaan pembangunan ekonomi yang tinggi disuatu daerah akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing–masing daerah dan tergantung pada potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi (faktor produksi) di daerah. Ditinjau dari aspek spasial, analisis antar regional akan memberikan gambaran perbedaan pola tentang hasil-hasil pembangunan ekonomi antar kabupaten.

Penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaaan kepemilikan sumber daya alam, kondisi infrastruktur, dan faktor produksi yang tersedia. Akibat

faktor tersebut menjadikan setiap wilayah akan menimbulkan kesenjangan daerah. Maka pemerintah menetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Data PDRB dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu :

1. pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit/ekonomi dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Dikelompokkan menjadi 9 sektor, yaitu : a. pertanian, b. Pertambangan, c. Konstruksi, d. Listrik, Gas dan Air Bersih, e. Konstruksi, d. perdagangan, Hotel, dan Restoran, f. pengangkutan dan Komunikasi, g. keuangan , *Real Estate*, dan Jasa Perusahaan, h. jasa – jasa.

2. Pendekatan pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir meliputi : pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, dan perubahan inventori/stok, dan ekspor neto.

3. Pendekatan pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor–faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah pada jangka waktu tertentu. Komponen balas jasa faktor produksi, yaitu : upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Serata turunan produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu :

a) PDRB atas dasar harga pasar

Yaitu jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi disuatu daerah termasuk penyusutan dan pajak tidak langsung

b) Produk Domestik Regional Neto (PDRN)

PDRN atas dasar harga merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan, penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam periode tertentu.

c) PDRN atas dasar biaya faktor

Adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung neto, pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah.

d) PDRB perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Terdapat dua ukuran PDRB perkapita, PDRB per

kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (riil)

2.2.5. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Menurut Warsito (2001) dalam Damang (2011) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005) dalam Damang (2001) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli yang bersumber dari hasil pajak daerah , hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang - Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah, pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, yaitu iuran wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah,

2. Retribusi daerah, Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

a) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) Pajak Parkir.

c) Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber

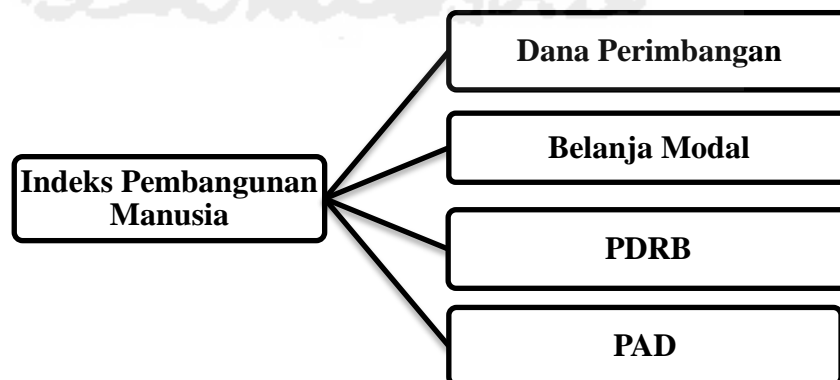
pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah..

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah yang mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahanjasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian dalam studi ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi beberapa variabel diantara , yaitu:

Gambar 2.1



Untuk mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, maka perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Kabupaten/kota Provinsi DIY. Pada penelitian ini, faktor yang mempengaruhi IPM kabupaten/kota provinsi di DIY antara lain :Dana Perimbangan, Belanja Modal, PDRB, PAD. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPM kabupaten/kota provinsi DIY, maka dapat membantu pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota di DIY.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan berbagai landasan teori yang di kemukakan, adalah merupakan salah satu kesimpulan dan argumentasi yang sifatnya sementara benar, sehingga dalam hal ini membutuhkan data-data hasil penelitian agar dapat dicari kebenarannya dan ditarik konsekuensi logis. Dalam penjelasan dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian :

- 1) Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2) Diduga Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 3) Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 4) Diduga PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).